

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi uraian tentang strategi pembangunan daerah Kota Malang tahun 2013-2018. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara Pemerintah Kota Malang untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Penyusunan strategi dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018 ini didasarkan pada analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan-kekuatan (*strengths*), kelemahan-kelemahan (*weaknesses*),

peluang-peluang (*opportunities*), dan tantangan-tantangan atau ancaman-ancaman (*threats*) secara bersama-sama.

SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Kota Malang. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola di Kota Malang, yang termasuk di dalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan, yang meliputi peluang dan ancaman.

Melalui analisis SWOT itu, dapat dirumuskan empat strategi utama, sebagaimana terlihat dari bagan di bawah ini. Pertama, adalah strategi S-O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua, adalah strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga, adalah strategi S-T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Keempat, strategi W-T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal di dalam mendayagunakan apa yang ada untuk kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan oleh adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi

berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik di dalam perumusan strategi pembangunan daerah Kota Malang 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018).

Bagan 6.1 Model Analisa SWOT

Faktor Internal / Faktor Eksternal		Kekuatan					Kelemahan				
		1	2	3	4	Dst	1	2	3	4	Dst
Peluang	1	S - O					W - O				
	2										
	3										
	4										
	Dst										
Tantangan	1	S - T					W - T				
	2										
	3										
	4										
	Dst										

KETERANGAN:

- S-O : Menggunakan kekuatan (S = *strength*) untuk meraih peluang (O = *opportunity*)
- W-O : Menekan kelemahan (W = *weakness*) untuk meraih peluang
- S-T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (T = *threat*)
- W-T : Menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan

6.1. ISU STRATEGIS

Isu strategis Kota Malang dalam 5 tahun mendatang masih terkait dengan tingkat pencapaian 5 tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima tahun mendatang.

Sebagaimana telah dirumuskan pada pembahasan di bab sebelumnya, berikut ini adalah isu-isu strategis Kota Malang selama 5 tahun mendatang, yakni:

1. Adanya berbagai dampak dinamika perkembangan kota menuju “kota metropolis”;
2. Pengelolaan Kependudukan Yang Berkualitas dan tingginya arus urbanisasi;
3. Masih tingginya angka kemiskinan;
4. Masih tingginya angka pengangguran;
5. Pelaksanaan *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal;
6. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun;
7. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Globalisasi yang menuntut kualitas SDM yang handal;
9. Peran perempuan yang belum optimal dalam pembangunan;
10. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
11. Potensi kepariwisataan daerah yang belum diberdayakan secara optimal;
12. Pelaku ekonomi sektor informal belum diberdayakan secara maksimal;
13. Pemberdayaan ekonomi sektro formal dan perbaikan iklim investasi;
14. Sarana transportasi dan manajemen transportasi yang belum memadai;
15. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota;
16. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
17. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban;
18. Penguatan Ketahanan Pangan;
19. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten;

20. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan.

A. Identifikasi Faktor Internal

Identifikasi faktor internal dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang dimiliki seperti posisi geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana. Selanjutnya, dilakukan juga identifikasi terhadap berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Malang dalam lima tahun mendatang (2013-2018).

1. Pertama : Faktor-Faktor Kekuatan (*Strengths*) Daerah

a. Letak geografis yang strategis di pusat wilayah Malang Raya.

Malang Raya adalah salah satu kawasan yang terdiri dari tiga daerah pemerintahan (Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang) yang saling bertautan dimana antara daerah satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan baik dalam hal kegiatan lalu lintas ekonomi (industri pariwisata, hasil produksi pertanian, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya), sosial, budaya maupun politik.

Posisi Kota Malang yang berada di tengah-tengah kawasan Malang Raya memungkinkan akses yang luas dan cepat bagi Kota Malang untuk menjangkau berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan.

b. Memiliki kekayaan sumberdaya manusia yang memadai, terdidik dan angkatan kerja yang berkualitas.

Dilihat dari aspek SDM tingkat pendidikan rata-rata angkatan kerja usia produktif, 35,07 % berpendidikan SMU dan 16,06 % berpendidikan sarjana.

- c. Di bidang pendidikan, Kota Malang memiliki 4 perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah unggulan, balai pelatihan kerja, dan berbagai komunitas pendidikan dengan banyak tenaga ahli dan akademisi, yang dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Kota Malang.
- d. Tersedianya lahan yang strategis untuk pengembangan industri yang mendorong perekonomian, investasi serta properti.
- e. Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, pasar modern dan tradisional, sekolah, kampus, sarana olah raga, sarana transportasi umum, terminal, jaringan pejalan kaki, jaringan listrik, prasarana telematika, dan jaringan air bersih yang memadai, termasuk jalur kereta api dan akses menuju bandar udara.
- f. Memiliki sarana kesehatan yang memadai terdiri dari Rumah Sakit Umum, rumah sakit swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Apotik, Klinik KB, Balai Pengobatan, Rumah Obat, dan Laboratorium Medis yang didukung tenaga medis yang memadai.
- g. Terdapat media massa yang cukup beragam, seperti koran, media online, radio dan televisi swasta. Beragamnya media

massa ini menjadikan informasi berkembang dengan baik dan cepat.

- h. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan meningkat. Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang mencapai 7,9%.
- i. Terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam. Sebagian besar dari UMKM ini mengolah produk-produk lokal dan khas Malang.
- j. Terdapat sarana pendukung pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran/rumah makan, agen atau biro perjalanan, *money changer*, situs-situs bernilai sejarah/*heritage*.
- k. Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dan pendidikan keagamaan, forum, dan paguyuban masyarakat.
- l. Tersedianya tokoh-tokoh potensial (agama, seni, budaya, sosial politik).

Kota Malang memiliki banyak tokoh masyarakat yang berpengaruh, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pengaruh mereka bahkan tidak hanya untuk komunitas mereka sendiri, melainkan juga untuk komunitas lainnya. Realitas ini merupakan potensi yang cukup besar ketika dikaitkan dengan pembangunan di daerah. Manakala terdapat sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu, proses pembangunan akan lebih mudah untuk dilakukan.

- m. Kondisi ketertiban sosial Kota Malang yang kondusif bagi berjalannya pembangunan. Di Kota Malang, relatif tidak pernah terjadi konflik horisontal yang mengganggu ketertiban sosial. Meskipun, potensi tersebut cukup banyak mengingat beragamnya latar belakang masyarakat Kota Malang.

2. Kedua : Faktor-Faktor Kelemahan (*weakness*) Daerah

- a. Produktivitas dan daya saing sektor informal masih lemah. Keberadaan pelaku usaha informal kalah bersaing dengan pelaku usaha skala besar. Bahkan, keberadaan pelaku usaha informal (PKL) sering dianggap merusak keindahan kota.
- b. Tingginya angka pengangguran, jumlah penduduk miskin dan disparitas ekonomi-sosial.

Angka kemiskinan di Kota Malang memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tetapi, jumlah penduduk yang terkategori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Pada Tahun 2012 tercatat sebanyak 16.990 Rumah Tangga Sasaran penerima Raskin. Selain itu, tingkat pengangguran di Kota Malang tergolong tinggi. Pada 2011, penduduk yang terkategori menganggur mencapai 22.185 orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,19%.

Jika dikaitkan dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi, maka bisa dipastikan terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat besar di kalangan masyarakat.

- c. Kemacetan lalu lintas

Di Kota Malang, tampak bahwa infrastruktur transportasi kota sudah tidak mampu menunjang mobilitas masyarakat. Kemacetan sudah menjadi pemandangan yang jamak di Kota Malang, terutama di jam-jam sibuk. Bahkan, jalan-jalan alternatif pun tidak mampu menampung luberan masyarakat pengguna jalan. Dampak lanjutannya, kondisi jalan-jalan di Kota Malang banyak yang rusak, dan tidak bisa secara cepat tertangani. Sebab, penanganan kerusakan jalan bisa jadi malah akan menimbulkan kemacetan baru.

d. Banjir di Kota Malang

Sebagai daerah yang terletak di dataran tinggi, sangat mengherankan jika Kota Malang mengalami banjir. Namun, faktanya, hampir setiap musim penghujan, terjadi banjir di Kota Malang. Berkurangnya daerah resapan air karena menjadi bangunan; penyempitan daerah sungai dan saluran air untuk keperluan rumah tangga; volume sampah yang menghambat selokan dan saluran pembuangan air; dan lain-lain adalah hal-hal yang bisa menjelaskan mengapa banjir bisa terjadi di Kota Malang.

e. Bertambahnya kawasan pemukiman kumuh dan padat penduduk.

Di bidang sarana pemukiman kota, dapat dilihat berkembangnya kawasan-kawasan hunian tanpa perencanaan, termasuk daerah-daerah kumuh di beberapa tempat, serta adanya bangunan-bangunan ruko di seantero kota.

- f. Banyak infrastruktur kota sudah tidak layak dan perlu diperbarui.

Perkembangan Kota Malang yang pesat ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai guna menjamin kenyamanan aktivitas masyarakat. Banyak infrastruktur yang sudah rusak, yang belum dilakukan perbaikan. Sedangkan, pengembangan infrastruktur-infrastruktur baru belum tersedia.

- g. Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang kota.

Konsistensi dan ketaatan terhadap Tata Ruang Kota adalah menjadi salah satu bagian penting dalam pengaturan pemanfaatan ruang Kota Malang. Namun, di Kota Malang, dapat dilihat banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan tata ruang kota.

- h. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam hal pelayanan publik masih banyak dijumpai ketidakpuasan masyarakat penerima layanan. Umumnya, keluhan masyarakat bersumber pada mekanisme layanan yang cenderung berbelit-belit, serta lamanya waktu pelayanan.

B. Identifikasi Faktor Eksternal

Identifikasi faktor eksternal dilakukan untuk mengetahui dan mengelompokkan peluang-peluang (*opportunities*) yang tersedia dan ancaman-ancaman (*threats*) yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Malang dalam 5 tahun mendatang (2013-2018).

Faktor-faktor eksternal yang jika dikelola dapat mendatangkan keuntungan atau manfaat yang besar dimasa yang akan datang dikategorikan sebagai *opportunity* (peluang). Sebaliknya jika faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, menjadi penghalang atau menghambat dalam pencapaian visi dan misi, dikategorikan sebagai *threats* (ancaman). Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.

1. Pertama : Faktor Peluang (*opportunities*) Daerah

- a. Akses menuju ke Kota Malang yang semakin mudah. Sejalan dengan perkembangan kawasan Malang Raya, Kota Malang kian mudah untuk dijangkau. Selain melalui sarana transportasi darat, sarana transportasi udara juga sudah tersedia.
- b. Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang luas dan dinamis bagi Kota Malang untuk melaksanakan pembangunan.
- c. Adanya berbagai Program Nasional beserta seluruh struktur pendukungnya yang menjangkau Kota Malang adalah peluang

- yang baik yang harus dimanfaatkan. Misalnya, keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program-program yang lain.
- d. Adanya *good political will* dari Walikota dan Wakil Wali Kota Malang masa jabatan 2013-2018. Sejak dilantik menjadi walikota dan wakil walikota, Abah Anton dan Sutiaji telah berkomitmen kuat untuk memimpin pembangunan Kota Malang dengan pembenahan dan pembaharuan di segala sektor, menuju tercapainya visi dan misi yang telah ditentukan.
 - e. Kemajuan kota yang pesat membuat Kota Malang menjadi tujuan investasi. Ketertarikan investor untuk menanamkan investasi ini merupakan peluang bagi pemerintah Kota Malang untuk lebih memajukan pembangunan di Kota Malang.
 - f. Dukungan luas dari kalangan pengusaha terhadap kepemimpinan Walikota - Wakil Walikota Malang 2013 -2018. Dukungan ini muncul dari kesepahaman kalangan pengusaha terhadap visi dan misi kepemimpinan baru di Kota Malang ini.

2. Pertama : Faktor Tantangan (*threat*) Daerah

- a. Arus Urbanisasi dan pendatang yang masuk ke Kota Malang semakin tinggi.

Besarnya arus urbanisasi dari daerah lain ke Kota Malang seiring dengan laju dan perkembangan daerah, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang. Jika arus

urbanisasi ini tidak diantisipasi secara baik, berbagai masalah akan muncul dan menghambat perkembangan kota.

- b. Penetrasi kekuatan ekonomi pasar global dan perdagangan bebas.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan pengusaha besar semakin menguat dan menjadi bagian dari nadi perekonomian masyarakat Kota Malang. Hal ini, misalnya, terlihat dari masuknya bisnis ritel dan pasar modern sampai ke berbagai pelosok kota. Kekuatan besar ini telah nyata berdampak pada terpinggirkannya bisnis ritel tradisional dan pertumbuhan UMKM. Manakala kekuatan ekonomi besar itu tidak diatur secara baik, dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastruktur pendukung yang memadai, kehadiran kekuatan ekonomi besar itu akan menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kota Malang.

- c. Krisis ekonomi global berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Kota Malang.
- d. Pertumbuhan sektor properti yang kurang terkendali, mengancam pemanfaatan tata ruang kota. Berkembangnya kawasan perumahan dan rumah-toko (ruko) adalah ancaman serius bagi daya dukung kawasan untuk kenyamanan kehidupan masyarakat Kota Malang.
- e. Semakin berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota diwajibkan untuk memiliki proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling

sedikit 20%. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau pada setiap wilayah ini merupakan perwujudan dan penguatan dari tujuan Penataan Ruang, yaitu “mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”.

Namun, dapat dilihat secara kasat mata bahwa RTH di Kota Malang banyak berkurang dan beralih fungsi menjadi pemukiman dan pertokoan/kawasan perdagangan.

- f. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi, berpotensi menimbulkan kemacetan dan menambah polusi udara.
- g. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi, menjadi beban kota dan memicu persoalan sanitasi, serta persoalan sosial.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat diketahui bahwa Kota Malang memiliki potensi dan kesempatan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kekuatan dan kesempatan besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena Kota juga memiliki kelemahan-kelemahan, berikut ancaman lingkungan eksternal yang sulit dikelola dan dikendalikan. Untuk mengatasi hal itu, perlu disusun strategi pembangunan daerah Kota Malang berdasarkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sebagaimana dijabarkan di atas. Strategi itu mencakup empat strategi utama.

Pertama adalah strategi S - O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua adalah strategi W - O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga adalah

strategi S - T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Keempat, strategi W - T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Secara lebih lengkap hal itu terlihat di dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2

Strategi Pembangunan Daerah Berdasar Analisis SWOT

Internal	KEKUATAN (<i>Strenghts</i>)	KELEMAHAN (<i>Weakneses</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak geografis yang strategis di pusat wilayah Malang Raya. 2. Memiliki kekayaan sumberdaya manusia yang memadai, terdidik dan angkatan kerja yang berkualitas. 3. Di bidang pendidikan, Kota Malang memiliki 4 perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah unggulan, balai pelatihan kerja, dan berbagai komunitas pendidikan. 4. Tersedianya lahan yang strategis untuk pengembangan industri yang mendorong perekonomian, investasi serta properti. 5. Tersedianya infrastruktur jalan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas dan daya saing sektor informal masih lemah 2. Produktivitas dan daya saing sektor informal masih lemah. 3. Tingginya angka pengangguran, jumlah penduduk miskin dan disparitas ekonomi-sosial. 4. Kemacetan lalu lintas Kota Malang 5. Banjir di Kota Malang 6. Bertambahnya kawasan pemukiman kumuh dan padat penduduk. 7. Banyak infrastruktur kota sudah tidak layak dan perlu diperbarui. 8. Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang kota. 9. Pelayanan publik belum optimal

	<p>jembatan, pasar modern dan tradisional, sekolah, kampus, sarana olah raga, sarana transportasi umum, terminal, jaringan pejalan kaki, jaringan listrik, prasarana telematika, dan jaringan air bersih yang memadai, termasuk jalur kereta api dan akses menuju bandar udara.</p> <p>6. Memiliki sarana kesehatan yang memadai terdiri dari Rumah Sakit Umum, rumah sakit swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Apotik, Klinik KB, Balai Pengobatan, Rumah Obat, dan Laboratorium Medis yang didukung tenaga medis yang memadai.</p> <p>7. Terdapat media massa yang cukup beragam, seperti koran, media online, radio dan televisi swasta.</p> <p>8. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan meningkat.</p>	
--	---	--

<p>Eksternal</p>	<p>9. Terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam.</p> <p>10. Terdapat sarana pendukung pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran/rumah makan, agen atau biro perjalanan, money changer, situs-situs bernilai sejarah/heritage.</p> <p>11. Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dan pendidikan keagamaan, forum, dan paguyuban masyarakat.</p> <p>12. Tersedianya tokoh-tokoh potensial (agama, seni, budaya, sosial politik).</p> <p>13. Kondisi ketertiban sosial Kota Malang yang kondusif bagi berjalannya pembangunan.</p>	
<p>PELUANG (<i>Opportunities</i>)</p>	<p>STRATEGI (SO)</p>	<p>STRATEGI (WO)</p>
<p>1. Akses menuju ke Kota</p>	<p>1. Memanfaatkan kebijakan</p>	<p>1. Meningkatkan penyelenggaraan</p>

<p>Malang yang semakin mudah.</p> <p>2. Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang luas dan dinamis bagi Kota Malang untuk melaksanakan pembangunan.</p> <p>3. Adanya berbagai Program Nasional beserta seluruh struktur pendukungnya yang menjangkau Kota Malang adalah peluang yang baik yang harus dimanfaatkan.</p> <p>4. Adanya <i>good political will</i> dari Walikota dan Wakil Wali Kota Malang masa jabatan 2013-2018.</p> <p>5. Kemajuan kota yang pesat membuat Kota Malang</p>	<p>otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai.</p> <p>2. Peningkatan Peran Tokoh Potensial Daerah dalam percepatan pembangunan.</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan terhadap bidang-bidang minat, bakat, dan ketrampilan khusus masyarakat</p> <p>4. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial</p> <p>5. Meningkatkan peran lembaga keagamaan/tokoh agama, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan</p> <p>6. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan.</p> <p>7. Transparansi pengelolaan dana pendidikan</p> <p>8. Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan dan prestasi</p>	<p>kesejahteraan sosial</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat miskin</p> <p>3. Kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain (akademisi, LSM, Swasta) dalam melaksanakan/menjalankan program/kegiatan.</p> <p>4. Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan</p> <p>5. Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus/staff.</p> <p>6. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal.</p> <p>7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik</p> <p>8. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>9. Pengarusutamaan gender dan pengendalian pertumbuhan penduduk</p> <p>10. Peningkatan dan optimalisasi investasi skala besar, disertai kajian kemanfaatan dan resiko</p>
---	---	---

<p>menjadi tujuan investasi. 6. Dukungan luas dari kalangan pengusaha terhadap kepemimpinan Walikota - Wakil Walikota Malang 2013 -2018.</p>	<p>9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 10. Peningkatan kesehatan sosial masyarakat 11. Fasilitasi investasi pengembangan destinasi wisata, baik destinasi lama maupun baru 12. Optimalisasi sentra wisata kreatif dan yang berbasis lingkungan 13. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan revitalisasi pertanian. 14. Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan legitimasi peraturan daerah 15. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal</p>	<p>yang akan ditimbulkan</p>
--	--	------------------------------

ANCAMAN (<i>Threats</i>)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
<p>1. Arus Urbanisasi dan pendatang yang masuk ke Kota Malang semakin</p>	<p>1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk dalam</p>	<p>1. Penataan kawasan industri kecil menengah terpadu 2. Optimalisasi peran pemerintah</p>

<p>tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetrasi kekuatan ekonomi pasar global dan perdagangan bebas. 3. Krisis ekonomi global berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Kota Malang. 4. Pertumbuhan sektor properti yang kurang terkendali, mengancam tata ruang kota. 5. Semakin berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau. 6. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi, berpotensi menimbulkan kemacetan dan menambah polusi udara. 7. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi, menjadi beban kota dan memicu persoalan sanitasi, serta persoalan sosial 	<p>pelaksanaan program/kegiatan pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya 3. Perluasan lapangan kerja 4. Penggunaan alokasi dana untuk pogram/kegiatan sesuai kebutuhan pembangunan 5. Meningkatkan komunikasi untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pelaku pembangunan di Kota Malang 6. Mengintensifkan promosi pemasaran produk-produk unggulan daerah 	<p>dalam perlindungan dan pembinaan UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan sistem transportasi terpadu 4. Peningkatan akses transportasi guna memperlancar aktivitas ekonomi industri 5. Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 6. Peningkatan pembangunan sarana pemukiman dan drainase 7. Optimalisasi dan penyempurnaan penataan ruang 8. Peningkatan pengendalian dan pengawasan program pembangunan terkait tata ruang 9. Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna pembangunan 10. Pengendalian dampak kewilayahan dari keberadaan industri berskala besar 11. Optimalisasi kebudayaan tradisional Malang sebagai kekayaan daerah untuk
--	---	--

		<p>menunjang sektor pariwisata</p> <p>12. Optimalisasi fungsi koperasi dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p>13. Peningkatan upaya guna menjamin keberlangsungan usaha yang layak bagi para pelaku usaha mikro</p> <p>14. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja industri</p> <p>15. Revitalisasi pasar tradisional</p>
--	--	--

Hasil analisis SWOT di atas, dapat dikembangkan secara kuantitatif untuk mengetahui posisi Kota Malang dalam Diagram Matriks SWOT.

Dalam Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS –*Internal Strategic Factors Analysis Summary*), didapatkan tabel berikut :

Tabel 6.3
Analisis Faktor Strategis Internal

KEKUATAN	SKOR	BOBOT	TOTAL
1. Letak geografis yang strategis di pusat wilayah Malang Raya.	0,02	3	0,06
2. Memiliki kekayaan sumberdaya manusia yang memadai, terdidik dan angkatan kerja yang berkualitas.	0,1	4	0,4
3. Di bidang pendidikan, Kota Malang memiliki 4 perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah unggulan, balai pelatihan kerja, dan berbagai komunitas pendidikan.	0,08	4	0,32
4. Tersedianya lahan yang strategis untuk pengembangan industri yang mendorong perekonomian, investasi serta properti.	0,02	2	0,04
5. Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, pasar modern dan tradisional, sekolah, kampus, sarana olah raga, sarana transportasi umum, terminal, jaringan pejalan kaki, jaringan listrik, prasarana telematika, dan jaringan air bersih yang memadai, termasuk jalur kereta api dan akses menuju bandar udara.	0,08	3	0,24
6. Memiliki sarana kesehatan yang memadai terdiri dari Rumah Sakit Umum, rumah sakit swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Apotik, Klinik KB, Balai Pengobatan, Rumah Obat, dan Laboratorium Medis yang didukung tenaga medis yang memadai.	0,06	3	0,18

7. Terdapat media massa yang cukup beragam, seperti koran, media online, radio dan televisi swasta.	0,04	3	0,12
8. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan meningkat.	0,1	4	0,4
9. Terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam.	0,1	4	0,4
10. Terdapat sarana pendukung pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran/ rumah makan, agen atau biro perjalanan, money changer, situs-situs bernilai sejarah/heritage.	0,04	3	0,12
11. Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dan pendidikan keagamaan, forum, dan paguyuban masyarakat.	0,04	3	0,12
12. Tersedianya tokoh-tokoh potensial (agama, seni, budaya, sosial politik).	0,02	3	0,06
13. Kondisi ketertiban sosial Kota Malang yang kondusif bagi berjalannya pembangunan.	0,02	4	0,08
KELEMAHAN			
1. Produktivitas dan daya saing sektor informal masih lemah	0,02	3	0,06
2. Tingginya angka pengangguran, jumlah penduduk miskin dan disparitas ekonomi-sosial.	0,08	4	0,32
3. Kemacetan lalu lintas Kota Malang	0,04	3	0,12
4. Banjir di Kota Malang	0,04	3	0,12
5. Bertambahnya kawasan pemukiman kumuh dan padat penduduk.	0,04	3	0,12
6. Banyak infrastruktur kota sudah tidak layak dan perlu diperbarui.	0,02	3	0,06
7. Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang kota.	0,02	2	0,04
8. Pelayanan publik belum optimal	0,02	4	0,08
TOTAL	1		3,46

Sedangkan dalam Analisis Faktor Strategis Eksternal (EFAS–*Eksternal Strategic Factors Analysis Summary*), didapatkan tabel berikut :

Tabel 6.4
Analisis Faktor Strategis Eksternal

PELUANG	SKOR	BOBOT	TOTAL
1. Akses menuju ke Kota Malang yang semakin mudah.	0,08	3	0,24
2. Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang luas dan dinamis bagi Kota Malang untuk melaksanakan pembangunan.	0,08	3	0,24
3. Adanya berbagai Program Nasional beserta seluruh struktur pendukungnya yang menjangkau Kota Malang adalah peluang yang baik yang harus dimanfaatkan.	0,1	4	0,4
4. Adanya <i>good political will</i> dari Walikota dan Wakil Wali Kota Malang masa jabatan 2013-2018.	0,14	4	0,56
5. Kemajuan kota yang pesat membuat Kota Malang menjadi tujuan investasi.	0,08	3	0,24
6. Dukungan pengusaha terhadap kepemimpinan Walikota - Wakil Walikota Malang 2013 -2018.	0,06	3	0,18
ANCAMAN			
1. Arus Urbanisasi dan pendatang yang masuk ke Kota Malang semakin tinggi.	0,1	4	0,4
2. Penetrasi kekuatan ekonomi pasar global dan perdagangan bebas.	0,04	2	0,08
3. Krisis ekonomi global berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Kota Malang.	0,04	2	0,08
4. Pertumbuhan sektor properti yang kurang terkendali, mengancam tata ruang kota.	0,08	4	0,32
5. Semakin berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau.	0,08	4	0,32
6. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi, berpotensi menimbulkan kemacetan dan menambah polusi udara.	0,06	3	0,18

7. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi, menjadi beban kota dan memicu persoalan sanitasi, serta persoalan sosial	0,06	3	0,18
TOTAL	1		3,42

Dari kedua tabel IFAS dan EFAS di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 6.5

Hasil Analisis Faktor Strategis Internal Dan Eksternal

IFAS	NILAI
Sub Total Analisis Kekuatan (a)	2,54
Sub Total Analisis Kelemahan (b)	0,92
Nilai (a) dikurangi (b)	1,62
EFAS	
Sub Total Analisis Peluang (c)	1,86
Sub Total Analisis Ancaman (d)	1,56
Nilai (c) dikurangi (d)	0,3
Koordinat Posisi dalam Diagram Matriks SWOT	(1,62 ; 0,3)

Dari Tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kota Malang berada pada KUADRAN I, mengingat nilai koordinat IFAS dan EFAS sama-sama memiliki nilai positif.

Dari hasil ini, ditarik kesimpulan bahwa Kota Malang merupakan kota yang kuat dan memiliki banyak peluang yang harus dioptimalkan. Strategi pembangunan yang perlu dikembangkan, menurut Teori Matriks SWOT, adalah Strategi PROGRESIF, yakni meneruskan pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, dengan kebijakan dan program yang lebih kreatif guna meraih kemajuan pembangunan secara maksimal.

6.2. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Malang 2013-2018, digunakan tiga strategi pokok yaitu strategi *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, dan *pro gender*. *Pro growth* berarti, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sejumlah instrumen seperti adanya peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. *Pro job* berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya bagi lulusan sekolah. *Pro poor* berarti, pembangunan memiliki dimensi keberpihakan kepada Wong Cilik, yakni kelompok-kelompok masyarakat yang belum berdaya. Strategi demikian dilakukan melalui program-program perlindungan dan pemberdayaan. *Pro gender* berarti pembangunan di Kota Malang dilakukan dengan prinsip kesetaraan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan. Keempat strategi itu sekaligus berarti adanya upaya untuk menggabungkan dua strategi pokok pembangunan yang selama ini dikenal, yaitu Strategi Pertumbuhan dan Strategi Pemerataan.

Melalui keempat strategi itu, diharapkan bisa tercipta adanya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang relatif tinggi secara bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang diusahakan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau sektor, melainkan oleh banyak orang. Karena itu, selain mendukung pertumbuhan ekonomi, juga mendukung adanya alokasi dan distribusi sumber-sumber ke berbagai sektor dan wilayah.

Sebagaimana terlihat di dalam bagan 6.2, terdapat empat kelompok strategi pembangunan daerah Kota Malang berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi.

Pertama adalah strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang pertama ini mencakup:

1. **Memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai;**
2. **Peningkatan Peran Tokoh Potensial Daerah dalam percepatan pembangunan;**
3. **Meningkatkan pembinaan terhadap bidang-bidang minat, bakat, dan ketrampilan khusus masyarakat;**
4. **Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial;**
5. **Meningkatkan peran lembaga keagamaan/tokoh agama, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan;**
6. **Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan;**
7. **Transparansi pengelolaan dana pendidikan;**
8. **Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan dan prestasi;**
9. **Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;**
10. **Peningkatan kesehatan sosial masyarakat;**
11. **Fasilitasi investasi pengembangan destinasi wisata, baik destinasi lama maupun baru;**
12. **Optimalisasi sentra wisata kreatif dan yang berbasis lingkungan;**
13. **Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan revitalisasi pertanian;**
14. **Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan legitimasi peraturan daerah;**
15. **Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal.**

Kedua adalah strategi W - O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang kedua ini mencakup:

1. **Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;**

2. **Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;**
3. **Kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain (akademisi, LSM, Swasta) dalam melaksanakan/menjalankan program/kegiatan;**
4. **Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan;**
5. **Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus/staff;**
6. **Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal;**
7. **Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik;**
8. **Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi;**
9. **Pengarusutamaan gender dan pengendalian pertumbuhan penduduk;**
10. **Peningkatan dan optimalisasi investasi skala besar, disertai kajian kemanfaatan dan resiko yang akan ditimbulkan.**

Ketiga adalah strategi S - T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman. Di dalam strategi ini mencakup:

1. **Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;**
2. **Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya;**
3. **Perluasan lapangan kerja;**
4. **Penggunaan alokasi dana untuk program/kegiatan sesuai kebutuhan pembangunan;**
5. **Meningkatkan komunikasi untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pelaku pembangunan di Kota Malang;**
6. **Mengintensifkan promosi pemasaran produk-produk unggulan daerah.**

Keempat, strategi W - T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan. Di dalam strategi ini mencakup:

1. **Penataan kawasan industri kecil menengah terpadu;**
2. **Optimalisasi peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan UKM;**
3. **Pengembangan sistem transportasi terpadu;**
4. **Peningkatan akses transportasi guna memperlancar aktivitas ekonomi industri;**
5. **Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;**
6. **Peningkatan pembangunan sarana pemukiman dan drainase;**
7. **Optimalisasi dan penyempurnaan penataan ruang;**
8. **Peningkatan pengendalian dan pengawasan program pembangunan terkait tata ruang;**
9. **Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna pembangunan;**
10. **Pengendalian dampak kewilayahan dari keberadaan industri berskala besar;**
11. **Optimalisasi kebudayaan tradisional Malang sebagai kekayaan daerah untuk menunjang sektor pariwisata;**
12. **Optimalisasi fungsi koperasi dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah;**
13. **Peningkatan upaya guna menjamin keberlangsungan usaha yang layak bagi para pelaku usaha mikro;**
14. **Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja industri;**
15. **Revitalisasi pasar tradisional.**

Semua strategi dari empat kelompok tersebut merupakan alternatif strategi yang dihasilkan dari proses analisis terhadap kekuatan, kelemahan,

peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kota Malang. Pada tahap berikutnya, semua alternatif strategi tersebut akan dipilih dan dipilah berdasarkan kaitan dan relevansinya dengan Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kota Malang 2013-2018.

Selain analisis SWOT, pemetaan potensi wilayah juga dapat dilakukan dengan analisis LQ dan Shift share sebagai berikut:

PDRB Kota Malang dan Jawa Timur 2009-2013

(Atas Dasar Harga Konstan 2000, dalam jutaan rupiah/ 000.000)

LAPANGAN USAHA	KOTA MALANG					JAWA TIMUR			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012
1. PERTANIAN	56.158,91	55.625,28	52.982,13	52.161,16	51.717,79	50.208.896, 71	51.329.548, 83	52.628.433, 15	54.463.942, 77
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	6.380,72	6.171,43	6.041,83	5.896,22	5.684,55	7.104.816,8 1	7.757.319,8 2	8.228.632,4 8	8.401.262,8 6
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4.083.960, 28	4.254.693, 26	4.521.178, 77	4.809.913, 23	5.057.287, 07	83.299.893, 42	86.900.779, 13	92.171.191, 46	98.017.056, 47
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	226.610,82	238.622,25	253.344,93	273.698,30	295.361,52	4.361.515,8 1	4.642.081,8 1	4.932.084,3 6	5.238.431,6 9
5. BANGUNAN	332.272,21	374.935,96	406.693,04	443.498,76	484.070,03	10.307.883, 76	10.992.599, 76	11.994.825, 72	12.840.565, 41
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5.310.305, 69	5.721.906, 62	6.191.342, 82	6.764.892, 36	7.315.892, 84	95.983.867, 09	106.229.11 2,97	116.645.21 4,35	128.375.49 8,60
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	430.545,59	460.113,26	492.812,03	531.807,80	575.756,40	22.781.527, 67	25.076.424, 92	27.945.256, 13	30.640.913, 33
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	1.014.463, 01	1.076.000, 18	1.147.143, 50	1.227.667, 56	1.311.652, 32	17.395.393, 53	18.659.490, 17	20.186.109, 19	21.802.468, 45
9. JASA-JASA	1.758.219, 63	1.856.556, 91	1.966.921, 35	2.067.445, 18	2.195.916, 22	29.417.374, 11	30.693.407, 48	32.251.530, 62	33.886.297, 81
PDRB Tanpa MIGAS	13.218.916 ,86	14.044.625 ,15	15.038.460 ,40	16.176.980 ,57	17.293.338 ,74	320.861.16 8,91	342.280.76 4,89	366.983.27 7,46	393.666.43 7,39

HASIL LOCATION QUOTIENT (LQ)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012
1. pertanian	0,03	0,03	0,02	0,02
2. pertambangan & penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02
3. industri pengolahan	1,19	1,19	1,20	1,19
4. listrik, gas & air bersih	1,26	1,25	1,25	1,27
5. bangunan	0,78	0,83	0,83	0,84
6. perdagangan, hotel & restoran	1,34	1,31	1,30	1,28
7. pengangkutan & komunikasi	0,46	0,45	0,43	0,42
8. keuangan, persewaan, & js. prsh.	1,42	1,41	1,39	1,37
9. jasa-jasa	1,45	1,47	1,49	1,48

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima sektor yang menjadi sektor basis di Kota Malang yang merupakan sektor unggulan daerah dan empat sektor lainnya menjadi sektor non basis sebagai sektor penunjang dari keberadaan sektor basis. Sektor unggulan tersebut secara berurutan adalah : 1) Jasa-jasa, 2) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 3) Perdagangan, hotel dan restoran, 4) Listrik gas dan air bersih, 5) Industri pengolahan. Pada kurun waktu 2009-2012 kelima sektor tersebut memiliki nilai LQ > 1, artinya kelima sektor tersebut merupakan sektor basis yang cenderung dapat mengekspor ke daerah lain. Sektor yang memiliki nilai LQ paling besar terdapat pada sektor jasa-jasa, dengan kisaran nilai LQ secara berturut-turut adalah 1,45; 1,47; 1,49; 1,48. Hal ini disebabkan karena produksi sektor jasa-jasa di Kota Malang telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Peringkat sektor unggulan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan potensi daerah di sektor-sektor yang memang sedang surplus dan berkembang.

HASIL SHIFT SHARE ANALYIS

SEKTOR	Nij		Mij		Cij		Pergeseran Struktur Ekonomi	
	nilai	(%)	nilai	(%)	nilai	(%)	nilai	(%)
1. Pertanian	12.742,78	0,42	-7.983,49	-2,50	-8.757,04	-2,42%	-3.997,75	-0,14
2. Pertambangan & penggalian	1.447,82	0,05	-283,51	-0,09	-1.648,82	-0,46%	-484,5	-0,02
3. Industri pengolahan	926.674,38	30,89	205.133,13	-64,12	4.411,70	1,22%	725.952,95	24,54
4. Listrik, gas & air bersih	51.419,32	1,71	-5.857,49	-1,83	1.525,65	0,42%	47.087,48	1,59
5. Bangunan	75.394,50	2,51	6.245,90	1,95	29.586,15	8,19%	111.226,55	3,76
6. Perdagangan, hotel & restoran	1.204.939,30	40,17	587.127,12	183,52	337.479,75	93,40%	1.454.586,67	49,17
7. Pengangkutan & komunikasi	97.693,30	3,26	50.840,36	15,89	-47.271,46	13,08%	101.262,21	3,42
8. Keuangan, persewaan, & js. prsh.	230.187,57	7,67	26.823,84	8,38	-43.806,85	12,12%	213.204,55	7,21
9. Jasa-jasa	398.950,28	13,30	131.851,34	-41,21	42.126,61	11,66%	309.225,55	10,45
Total	2.999.449,25		319.928,27		361.313,80		2.958.063,71	

Industrial Mix (Mij)

Industrial Mix menunjukkan cepat lambatnya pertumbuhan sebuah sektor di Kota Malang dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Nilai Mij > 0 (+) menunjukkan sektor tersebut tumbuh lebih cepat dibanding sektor yang sama di Jawa Timur. Nilai Mij < 0 (-) menunjukkan sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibanding sektor yang sama di Jawa Timur.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara berurutan sektor yang tumbuh paling cepat adalah : 1) Perdagangan, hotel & restoran; 2) Pengangkutan & komunikasi; 3) Keuangan, persewaan, & js. Prsh; dan 4) Bangunan. Adapun lima sektor lainnya tumbuh lebih lambat dibandingkan lima sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Competitive Advantages (Cij)

Competitive advantages menunjukkan tingkat kompetisi sebuah sektor di Kota Malang dengan pertumbuhan total sektor yang sama pada tingkat Provinsi Jawa Timur. Nilai Cij > 0 (+) menunjukkan sektor tersebut lebih kompetitif dibanding sektor yang sama di Jawa Timur. Nilai Mij < 0 (-) menunjukkan sektor tersebut tidak kompetitif dibanding sektor yang sama di Jawa Timur.

Peringkat sektor yang paling kompetitif secara berurutan adalah : 1) Jasa-jasa; 2) Bangunan; 3) Industri pengolahan; 4) Listrik, gas & air bersih. Adapun lima sektor lainnya berdasarkan analisa ini dianggap kurang kompetitif.

Berdasarkan tabel tersebut antara Cij dan Mij dapat dielaborasi untuk menentukan pemeringkatan sebagaimana penjelasan dan matrik berikut :

Tingkat Mij dan Cij > 0 , adalah unggul

Tingkat Cij > 0 tetapi tingkat Mij < 0 , adalah agak unggul

Tingkat Mij > 0 tetapi tingkat Cij < 0 , adalah kurang unggul

Tingkat Cij dan Mij < 0 , adalah tidak unggul

6.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG

Berdasarkan kondisi riil, analisis SWOT dan analisis LQ/Shift share maka dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Malang. Adapun arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel berikut ini akan menunjukkan arah kebijakan pembangunan Kota Malang 2013-2018, beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dipilih.

Tabel 6.6

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 1: Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemerataan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Peningkatan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Pemberdayaan Masyarakat Miskin	1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
Terwujudnya dan tumbuhnya kehidupan beragama yang berkualitas dan toleran	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Meningkatkan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan	1. Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di bidang pendidikan keagamaan dan kerukunan umat beragama	Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di bidang pendidikan keagamaan dan kerukunan umat beragama	Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di bidang pendidikan keagamaan dan kerukunan umat beragama	Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di bidang pendidikan keagamaan dan kerukunan umat beragama	Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di bidang pendidikan keagamaan dan kerukunan umat beragama	Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di bidang pendidikan keagamaan dan kerukunan umat beragama

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan berkesadaran hukum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan hukum	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan hukum	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan hukum	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan hukum	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan hukum	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan hukum
			2. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	2. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	2. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	2. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	2. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	2. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan
			3. Peningkatan pembinaan kelompok/organisasi masyarakat	3. Peningkatan pembinaan kelompok/organisasi masyarakat	3. Peningkatan pembinaan kelompok/organisasi masyarakat	3. Peningkatan pembinaan kelompok/organisasi masyarakat	3. Peningkatan pembinaan kelompok/organisasi masyarakat	3. Peningkatan pembinaan kelompok/organisasi masyarakat
Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
dan Anak	dan Anak	dan Anak	dan Anak	Anak	dan Anak	dan Anak	dan Anak	Anak

Tabel 6.7
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018
Dalam Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima	Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
			dan kecepatan layanan di bidang perijinan	publik dan kecepatan layanan di bidang perijinan	dan kecepatan layanan di bidang perijinan	dan kecepatan layanan di bidang perijinan	dan kecepatan layanan di bidang perijinan	publik dan kecepatan layanan di bidang perijinan
		Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
			daerah	daerah	daerah	daerah	daerah	daerah
	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik	Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Peningkatan Pengawasan Aparatur	1. Peningkatan Pengawasan Aparatur	1. Peningkatan Pengawasan Aparatur	1. Peningkatan Pengawasan Aparatur	1. Peningkatan Pengawasan Aparatur	1. Peningkatan Pengawasan Aparatur
			2. Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2. Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2. Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2. Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2. Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2. Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Terwujudnya Peningkatan kualitas peraturan daerah	Meningkatnya kualitas dan legitimasi peraturan daerah	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan legitimasi peraturan daerah	1. Peningkatan kualitas substansi peraturan daerah	1. Peningkatan kualitas substansi peraturan daerah	1. Peningkatan kualitas substansi peraturan daerah	1. Peningkatan kualitas substansi peraturan daerah	1. Peningkatan kualitas substansi peraturan daerah	1. Peningkatan kualitas substansi peraturan daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
			2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah	2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah	2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah	2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah	2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah	2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah
Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya	1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah	1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah	1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah	1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah	1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah	1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah
			2. Peningkatan partisipasi publik	2. Peningkatan partisipasi publik	2. Peningkatan partisipasi publik	2. Peningkatan partisipasi publik	2. Peningkatan partisipasi publik	2. Peningkatan partisipasi publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
			dalam perencanaan daerah	dalam perencanaan daerah	dalam perencanaan daerah	dalam perencanaan daerah	dalam perencanaan daerah	dalam perencanaan daerah

Tabel 6.8

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 3 : Mengembangkan potensi daerah dengan wawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
			2. Optimalisasi pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2. Optimalisasi pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2. Optimalisasi pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2. Optimalisasi pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2. Optimalisasi pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2. Optimalisasi pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			3. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
				an lingkungan hidup				an lingkungan hidup
		Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan	1. Optimalisasi potensi Ruang Terbuka Hijau	1. Optimalisasi potensi Ruang Terbuka Hijau	1. Optimalisasi potensi Ruang Terbuka Hijau	1. Optimalisasi potensi Ruang Terbuka Hijau	1. Optimalisasi potensi Ruang Terbuka Hijau	1. Optimalisasi potensi Ruang Terbuka Hijau
			2. Peningkatan kebersihan kota	2. Peningkatan kebersihan kota	2. Peningkatan kebersihan kota	2. Peningkatan kebersihan kota	2. Peningkatan kebersihan kota	2. Peningkatan kebersihan kota
			3. Peningkatan keindahan lingkungan kota	3. Peningkatan keindahan lingkungan kota	3. Peningkatan keindahan lingkungan kota	3. Peningkatan keindahan lingkungan kota	3. Peningkatan keindahan lingkungan kota	3. Peningkatan keindahan lingkungan kota
	Meningkatnya daya dukung tata ruang	Peningkatan pengendalian dan pengawasan	1. Sinkronisasi program pembang	Sinkronisasi program pembang	Sinkronisasi program pembangunan	Sinkronisasi program pembangunan	Sinkronisasi program pembangunan	Sinkronisasi program pembang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
	terhadap pembangunan	program pembangunan terkait tata ruang	unan dengan rencana tata ruang wilayah;	unan dengan rencana tata ruang wilayah;	dengan rencana tata ruang wilayah;	dengan rencana tata ruang wilayah;	dengan rencana tata ruang wilayah;	unan dengan rencana tata ruang wilayah;
		Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna pembangunan	1. Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah	Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah	Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah	Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah	Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah	Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah

Tabel 6.9
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018
Dalam Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang sehingga Bisa Bersaing di Era Global

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya kualitas dan relevansi pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan	1. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan	1. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan	1. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan	1. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan	1. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan	1. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan
			2. Pemerataan jangkauan pendidikan	2. Pemerataan jangkauan pendidikan	2. Pemerataan jangkauan pendidikan	2. Pemerataan jangkauan pendidikan	2. Pemerataan jangkauan pendidikan	
Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam	Meningkatnya semangat profesionalitas pemuda dan budaya	Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam upaya	1. Peningkatan profesionalitas pemuda	1. Peningkatan profesionalitas pemuda	1. Peningkatan profesionalitas pemuda	1. Peningkatan profesionalitas pemuda	1. Peningkatan profesionalitas pemuda	1. Peningkatan profesionalitas pemuda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
pembangunan daerah	prestasi di kalangan pemuda	pemberdayaan dan prestasi	dalam menunjang pembangunan daerah	dalam menunjang pembangunan daerah	dalam menunjang pembangunan daerah	dalam menunjang pembangunan daerah	dalam menunjang pembangunan daerah	dalam menunjang pembangunan daerah
			2. Peningkatan budaya prestasi pemuda, khususnya di bidang olahraga	2. Peningkatan budaya prestasi pemuda, khususnya di bidang olahraga	Peningkatan budaya prestasi pemuda, khususnya di bidang olahraga	2. Peningkatan budaya prestasi pemuda, khususnya di bidang olahraga	2. Peningkatan budaya prestasi pemuda, khususnya di bidang olahraga	2. Peningkatan budaya prestasi pemuda, khususnya di bidang olahraga
		Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas olahraga	1. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Tabel 6.10

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang baik Fisik, maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kesehatan dan tenaga kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan
	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu dan anak
	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	1. Pelayanan peningkatan kesehatan dan	1. Pelayanan peningkatan kesehatan dan	1. Pelayanan peningkatan kesehatan dan gizi	1. Pelayanan peningkatan kesehatan dan gizi	1. Pelayanan peningkatan kesehatan dan gizi	1. Pelayanan peningkatan kesehatan dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
			gizi masyarakat	gizi masyarakat	masyarakat	masyarakat	masyarakat	gizi masyarakat
			2. Peningkatan kesehatan lingkungan;	2. Peningkatan kesehatan lingkungan;	2. Peningkatan kesehatan lingkungan;	2. Peningkatan kesehatan lingkungan;	2. Peningkatan kesehatan lingkungan;	2. Peningkatan kesehatan lingkungan;
			3. Peningkatan dan pemerataan jangkauan layanan kesehatan	3. Peningkatan dan pemerataan jangkauan layanan kesehatan	3. Peningkatan dan pemerataan jangkauan layanan kesehatan	3. Peningkatan dan pemerataan jangkauan layanan kesehatan	3. Peningkatan dan pemerataan jangkauan layanan kesehatan	3. Peningkatan dan pemerataan jangkauan layanan kesehatan
	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tabel 6.11
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018
Dalam Misi 6 : Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan, lingkungan, dan kreativitas masyarakat	Meningkatnya kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik wisata.	Pengembangan kebudayaan tradisional Malang sebagai kekayaan daerah untuk menunjang sektor pariwisata	1. Revitalisasi khazanah budaya tradisional dan tempat dengan nilai sejarah tinggi	1. Revitalisasi khazanah budaya tradisional dan tempat dengan nilai sejarah tinggi	1. Revitalisasi khazanah budaya tradisional dan tempat dengan nilai sejarah tinggi	1. Revitalisasi khazanah budaya tradisional dan tempat dengan nilai sejarah tinggi	1. Revitalisasi khazanah budaya tradisional dan tempat dengan nilai sejarah tinggi	1. Revitalisasi khazanah budaya tradisional dan tempat dengan nilai sejarah tinggi
			2. Peningkatan promosi terhadap khazanah budaya yang dimiliki	2. Peningkatan promosi terhadap khazanah budaya	2. Peningkatan promosi terhadap khazanah budaya yang dimiliki	2. Peningkatan promosi terhadap khazanah budaya yang dimiliki	2. Peningkatan promosi terhadap khazanah budaya yang dimiliki	2. Peningkatan promosi terhadap khazanah budaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Kota Malang	yang dimiliki Kota Malang	Kota Malang	Kota Malang	Kota Malang	yang dimiliki Kota Malang
	Meningkatnya ragam dan kualitas obyek wisata alam dan buatan	Pengembangan destinasi wisata, baik destinasi lama maupun baru	1. Peningkatan promosi destinasi wisata Kota Malang	Peningkatan promosi destinasi wisata Kota Malang	Peningkatan promosi destinasi wisata Kota Malang	Peningkatan promosi destinasi wisata Kota Malang	Peningkatan promosi destinasi wisata Kota Malang	Peningkatan promosi destinasi wisata Kota Malang

Tabel 6.12
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018
Dalam Misi 7 : Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM agar Lebih Produktif dan Kompetitif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil menengah	Peningkatan peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan UKM	Peningkatan nilai produktivitas UKM dari segi volume (omset) dan nilai uang	Peningkatan nilai produktivitas UKM dari segi volume (omset) dan nilai uang	Peningkatan nilai produktivitas UKM dari segi volume (omset) dan nilai uang	Peningkatan nilai produktivitas UKM dari segi volume (omset) dan nilai uang	Peningkatan nilai produktivitas UKM dari segi volume (omset) dan nilai uang	Peningkatan nilai produktivitas UKM dari segi volume (omset) dan nilai uang
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui UMKM	Peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
	Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro	Peningkatan peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan pelaku usaha mikro	Penataan disertai pemberdayaan terhadap PKL	Penataan disertai pemberdayaan terhadap PKL	Penataan disertai pemberdayaan terhadap PKL	Penataan disertai pemberdayaan terhadap PKL	Penataan disertai pemberdayaan terhadap PKL	Penataan disertai pemberdayaan terhadap PKL
		Revitalisasi pasar tradisional	Penataan dan Perlindungan pasar tradisional	Penataan dan Perlindungan pasar tradisional	Penataan dan Perlindungan pasar tradisional	Penataan dan Perlindungan pasar tradisional	Penataan dan Perlindungan pasar tradisional	Penataan dan Perlindungan pasar tradisional
	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi di Kota Malang	Peningkatan fungsi koperasi dalam menunjang keberlangsungan UMKM	1. Penguatan koperasi dalam ekonomi daerah	1. Penguatan koperasi dalam ekonomi daerah	1. Penguatan koperasi dalam ekonomi daerah	1. Penguatan koperasi dalam ekonomi daerah	1. Penguatan koperasi dalam ekonomi daerah	1. Penguatan koperasi dalam ekonomi daerah
			2. Pengawasan dan pengendalian	2. Pengawasan dan pengendalian	2. Pengawasan dan pengendalian	2. Pengawasan dan pengendalian	2. Pengawasan dan pengendalian	2. Pengawasan dan pengendalian

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
			terhadap jenis usaha koperasi	alian terhadap p jenis usaha koperasi	terhadap jenis usaha koperasi	terhadap jenis usaha koperasi	terhadap jenis usaha koperasi	alian terhadap p jenis usaha koperasi
Terwujudnya Peningkatan pengelolaan potensi pangan daerah	Meningkatnya daya saing produk pangan daerah	Pengembangan produk yang berbasis potensi sumber daya lokal	1. Peningkatan pengelolaan produk lokal	Peningkatan pengelolaan produk lokal	Peningkatan pengelolaan produk lokal	Peningkatan pengelolaan produk lokal	Peningkatan pengelolaan produk lokal	Peningkatan pengelolaan produk lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
	Meningkatnya produk pangan lokal sebagai pendukung ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan daerah	1. Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, pengolahan, dan distribusi produk pangan daerah guna ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, pengolahan, dan distribusi produk pangan daerah guna ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, pengolahan, dan distribusi produk pangan daerah guna ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, pengolahan, dan distribusi produk pangan daerah guna ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, pengolahan, dan distribusi produk pangan daerah guna ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, pengolahan, dan distribusi produk pangan daerah guna ketahanan pangan

Tabel 6.13

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 8 : Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya pertumbuhan industri-industri baru guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai investasi untuk pengembangan industri berskala besar	Peningkatan dan optimalisasi investasi skala besar	Penciptaan peluang investasi skala besar di berbagai sektor terutama pangan, energi, pariwisata dan infrastruktur	Penciptaan peluang investasi skala besar di berbagai sektor terutama pangan, energi, pariwisata dan infrastruktur	Penciptaan peluang investasi skala besar di berbagai sektor terutama pangan, energi, pariwisata dan infrastruktur	Penciptaan peluang investasi skala besar di berbagai sektor terutama pangan, energi, pariwisata dan infrastruktur	Penciptaan peluang investasi skala besar di berbagai sektor terutama pangan, energi, pariwisata dan infrastruktur	Penciptaan peluang investasi skala besar di berbagai sektor terutama pangan, energi, pariwisata dan infrastruktur
			Peningkatan kerjasama dengan daerah lain, swasta dan pihak ketiga	Peningkatan kerjasama dengan daerah	Peningkatan kerjasama dengan daerah	Peningkatan kerjasama dengan daerah	Peningkatan kerjasama dengan daerah	Peningkatan kerjasama dengan daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
				lain, swasta dan pihak ketiga	lain, swasta dan pihak ketiga	lain, swasta dan pihak ketiga	lain, swasta dan pihak ketiga	lain, swasta dan pihak ketiga
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja industri	Mengembangkan kualitas hubungan industrial	Mengembangkan kualitas hubungan industrial	Mengembangkan kualitas hubungan industrial	Mengembangkan kualitas hubungan industrial	Mengembangkan kualitas hubungan industrial	Mengembangkan kualitas hubungan industrial
Terwujudnya kawasan industri terintegrasi yang memperhatikan daya dukung lingkungan	Terintegrasinya sentra industri kecil menengah	Pengelolaan industri kecil menengah menuju penataan kawasan terpadu	Peningkatan produktivitas industri kecil menengah berbasis kawasan	Peningkatan produktivitas industri kecil menengah berbasis kawasan	Peningkatan produktivitas industri kecil menengah berbasis kawasan	Peningkatan produktivitas industri kecil menengah berbasis kawasan	Peningkatan produktivitas industri kecil menengah berbasis kawasan	Peningkatan produktivitas industri kecil menengah berbasis kawasan

Tabel 6.14

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 9 : Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya daya dukung transportasi	Meningkatnya fungsi sarana transportasi	Peningkatan akses transportasi	Penyelesaian persoalan kota di bidang transportasi	Penyelesaian persoalan kota di bidang transportasi	Penyelesaian persoalan kota di bidang transportasi	Penyelesaian persoalan kota di bidang transportasi	Penyelesaian persoalan kota di bidang transportasi	Penyelesaian persoalan kota di bidang transportasi
Terwujudnya Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang terpadu yang menjamin kelancaran	Meningkatnya daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan untuk menunjang mobilitas masyarakat	Pengembangan sistem transportasi terpadu	Peningkatan penerapan sistem manajemen sesuai standar layanan publik	Peningkatan penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar layanan publik	Peningkatan penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar layanan publik	Peningkatan penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar layanan publik	Peningkatan penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar layanan publik	Peningkatan penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar layanan publik

mobilitas masyarakat								
Terwujudnya ketersediaan infrastruktur perkotaan di bidang pemukiman dan drainase	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur pemukiman dan drainase	Peningkatan pembangunan sarana pemukiman dan drainase	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan
			2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pemukiman dan drainase perkotaan	2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pemukiman dan drainase perkotaan	2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pemukiman dan drainase perkotaan	2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pemukiman dan drainase perkotaan	2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pemukiman dan drainase perkotaan	2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pemukiman dan drainase

				an				perkotaan
		Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan TPU secara profesional	Optimalisasi lahan TPU	Optimalisasi lahan TPU	Optimalisasi lahan TPU	Optimalisasi lahan TPU	Optimalisasi lahan TPU	Optimalisasi lahan TPU

Dari sembilan tabel di atas, dapat dirumuskan bahwa terdapat 32 Strategi Pembangunan Kota Malang 2013-2018, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial**, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. **Pemberdayaan masyarakat miskin**, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
3. Meningkatkan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di bidang pendidikan keagamaan dan kerukunan umat beragama.
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan hukum;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan.
 - c. Peningkatan pembinaan kelompok/organisasi masyarakat
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

6. **Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik**, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
 - b. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dan kecepatan layanan di bidang perijinan.
7. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
8. **Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi**, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan Pengawasan Aparatur;
 - b. Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
9. **Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan legitimasi peraturan daerah**, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan kualitas substansi peraturan daerah;
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah.
10. **Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya**, dengan arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan daerah;
 - b. Peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan daerah.
11. **Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**, dengan arah kebijakan berupa:

- a. Peningkatan perencanaan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b. Optimalisasi pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - c. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
12. **Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan**, dengan arah kebijakan berupa:
- a. Optimalisasi potensi Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Peningkatan kebersihan kota;
 - c. Peningkatan keindahan lingkungan kota.
13. **Peningkatan pengendalian dan pengawasan program pembangunan terkait tata ruang**, dengan arah kebijakan berupa:
- Sinkronisasi program pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah.
14. **Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna pembangunan**, dengan arah kebijakan berupa:
- Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah.
15. **Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan**, dengan arah kebijakan berupa:
- a. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan;
 - b. Pemerataan jangkauan pendidikan.
16. **Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan dan prestasi**, dengan arah kebijakan berupa:

- a. Peningkatan profesionalitas pemuda dalam menunjang pembangunan daerah;
 - b. Peningkatan budaya prestasi pemuda, khususnya di bidang olahraga.
17. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas olahraga, dengan arah kebijakan berupa:
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
18. **Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan**, dengan arah kebijakan berupa:
a. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
19. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, dengan arah kebijakan berupa:
Pelayanan kesehatan ibu dan anak
20. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan arah kebijakan berupa:
a. Pelayanan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat;
b. Peningkatan kesehatan lingkungan;
c. Peningkatan dan pemerataan jangkauan layanan kesehatan.
21. Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan arah kebijakan berupa:
Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
22. **Pengembangan kebudayaan tradisional Malang sebagai kekayaan daerah untuk menunjang sektor pariwisata**, dengan arah kebijakan berupa:

- a. Revitalisasi khazanah budaya tradisional dan tempat dengan nilai sejarah tinggi;
 - b. Peningkatan promosi terhadap khazanah budaya yang dimiliki Kota Malang.
23. **Pengembangan destinasi wisata, baik destinasi lama maupun baru**, dengan arah kebijakan berupa:
- a. Peningkatan promosi destinasi wisata Kota Malang.
24. Peningkatan peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan UKM, dengan arah kebijakan berupa:
- a. Peningkatan nilai produktivitas UKM dari segi volume (omset) dan nilai uang;
25. **Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui UMKM**, dengan arah kebijakan berupa:
- Peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
26. **Peningkatan peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan pelaku usaha mikro**, dengan arah kebijakan berupa:
- Penataan disertai pemberdayaan terhadap PKL.
27. **Revitalisasi pasar tradisional**, dengan arah kebijakan berupa:
- Penataan dan Perlindungan pasar tradisional.
28. **Peningkatan fungsi koperasi dalam menunjang keberlangsungan UMKM**, dengan arah kebijakan berupa:
- a. Penguatan koperasi dalam ekonomi daerah;
 - b. Pengawasan dan pengendalian terhadap jenis usaha koperasi.

29. **Pengembangan produk yang berbasis potensi sumber daya lokal**, dengan arah kebijakan berupa:
Peningkatan pengelolaan produk lokal.
30. **Peningkatan ketahanan pangan daerah**, dengan arah kebijakan berupa:
Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, pengolahan, dan distribusi produk pangan daerah guna ketahanan pangan.
31. **Peningkatan dan optimalisasi investasi skala besar**, dengan arah kebijakan berupa:
Penciptaan peluang investasi skala besar di berbagai sektor terutama pangan, energi, pariwisata dan infrastruktur.
32. **Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja industri**, dengan arah kebijakan berupa:
Mengembangkan kualitas hubungan industrial.
33. **Pengelolaan industri kecil menengah menuju penataan kawasan terpadu**, dengan arah kebijakan berupa:
Peningkatan produktivitas industri kecil menengah berbasis kawasan.
34. **Peningkatan akses transportasi**, dengan arah kebijakan berupa :
Penyelesaian persoalan kota di bidang transportasi.
35. **Pengembangan sistem transportasi terpadu**, dengan arah kebijakan berupa:
Peningkatan penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar layanan publik.

36. **Peningkatan pembangunan sarana pemukiman dan drainase**, dengan arah kebijakan berupa:
- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan;
 - b. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pemukiman dan drainase perkotaan.